

**STRATEGI SOSIALISASI PENTINGNYA TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

TUGAS AKHIR

Penerbitan Hak Cipta

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Oleh :

SUKAMTO

NIM : 21222034

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

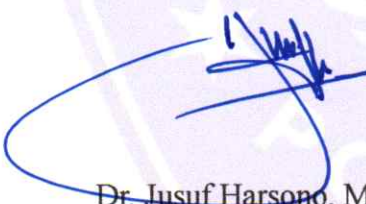
HKI ini disusun oleh : SUKAMTO
NIM : 21222034
Judul : STRATEGI SOSIALISASI PENTINGNYA TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN
BADEGAN KABUPATEN PONOROGO
Disahkan Pada : 24 Januari 2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 24 Februari 2023

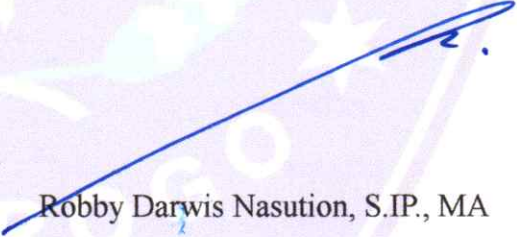
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jusuf Harsono, M.Si

NIDN. 0713016201



Robby Darwis Nasution, S.IP., MA

NIDN. 0728028603

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : STRATEGI SOSIALISASI PENTINGNYA TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN
BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

Disusun Oleh : SUKAMTO

Nim : 21222034

Telah Dipertahankan di : 24 Januari 2023

Depan pengujian pada

hari : Selasa

ruang : Ruang Sidang B 102

pukul : 14.00 WIB -15.30 WIB

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Penguji II

Penguji III

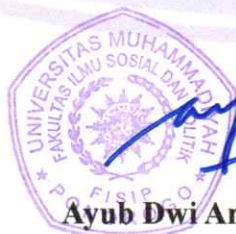

Dr. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN. 0713016201


Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si
NIDN. 0722126101


Robby Darwis Nasution, S.IP., MA
NIDN. 0728028603

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik




Ayub Dwi Anggoro, M.Si., Ph.D

NIK. 19860325 201309 12

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukamto
NIM : 21222034
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 24 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



SUKAMTO

NIM. 21222034



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id

Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PENGESAHAN

PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP., MA

NIK : 19860228 201509 12

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/ PKM yang dilakukan dan/atau diajukan oleh:

Nama : Sukamto

NIM : 21222034

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Strategi Sosialisasi Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan
di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 Februari 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi

Pembimbing

Robby Darwis Nasution, S.IP. MA

NIK. 19860228 201509 12

Dr Jusuf Harsono, M.Si

NIDN. 0713016201

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, tiada hal yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur tiada terhingga atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir HKI berupa Poster ini.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pendidik sejati Rosululloh SAW yang telah memberi suri tauladan kepada seluruh ummat manusia. Semoga kita kelak mendapatkan syafa'at beliau di yaumul kiyamah nanti.

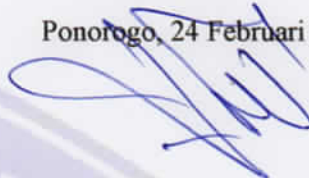
Dalam rangka proses penyusunan HKI ini, penulis secara pribadi tidak lepas dari segala kekurangan dan bukan berjalan tanpa hambatan akan tetapi berkat motivasi, dorongan, arahan, saran dan bantuan dari berbagai pihak, kesulitan maupun hambatan tersebut dapat terlewati sehingga HKI ini terselesaikan dengan baik. Maka dari itu izinkan penulis memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Happy Susanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Ayub Dwi Anggoro, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dr. Jusuf Harsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Ibu, istri dan anak-anakku tercinta Zaky, Fachri, dan Farid atas semua doa-doa'nya danyang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan HKI ini.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2021 di prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian HKI ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberi andil dalam keberhasilan penulis menyelesaikan tugas akhir HKI.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, serta kekurangan datang dari kita. Termasuk dalam penulisan HKI ini penulis menyadari adanya kekurangan, dan meminta maklum dari pembaca untuk sudi kiranya memberikan kritik dan saran kedepannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang sepadan dan dicatat sebagai amal sholih kepada semua pihak tersebut atas segala bimbingan dan bantuannya. Akhirnya semoga dengan Rahmat dan Berkah-Nya HKI ini mendapat Ridho Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semuanya

Ponorogo, 24 Februari 2023



Sukanto



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Karya	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Definisi Konsep	3
B. Landasan Teori	3
C. Metode Penelitian	4
BAB III DESKRIPSI	5
A. Deskripsi Poster Lengkap	5
B. Model	8
C. Hasil HKI	9
BAB VI PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Kritik dan Saran	10

DAFTAR GAMBAR

A. Sosialisasi Kades dan Tokoh Masyarakat	11
B. Konferensi Sekdes di Pendopo Kecamatan	12
C. Sosialisasi ke Penduduk Langsung	13
D. Website Dinas Dukcapil	14
E. Pengajian Tingkat Desa	15
F. Rembug Warga RT.....	16

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Administrasi kependudukan menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh setiap warga Negara Indonesia . Setiap penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan pengakuan Negara bagi warga Negara sebagai bukti identitas diri dan sebagai sarana pendukung akses pelayanan publik sehingga memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum serta perlindungan status hak sipil penduduk. Sehingga penduduk dapat mengakses program-program dari pemerintah seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Output dari administrasi kependudukan Pertama adalah berupa data kependudukan perseorangan maupun agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang di gunakan dasar dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan Nasional ,Regional ,maupun Lokal. Yang Kedua dari output administrasi kependudukan berupa Kartu, Surat, dan Akta. Contohnya adalah kartu keluarga (KK) , Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) , Surat pindah, Akta kelahiran, Akta kematian dan masih banyak lagi lainnya. Dalam hal kesadaran akan tertib administrasi kependudukan bagi sebagian besar penduduk atau masyarakat masih belum maksimal. Dengan adanya tingkat kesadaran penduduk yang masih rendah tersebut ada yang di manfaatkan oleh sebagian kecil orang yang mengambil keuntungan

B. TUJUAN

Bertujuan Untuk :

1. memberi pengertian kepada penduduk supaya memperhatikan tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan bersama.
2. agar dapat menjadi solusi atau pemecah masalah bagi pemerintah desa atau pemerintah daerah dalam hal tertib administrasi kependudukan.

C. MANFAAT

Diharapkan Dapat :

1. Menjadi solusi dari penertiban administrasi kependudukan di wilayah kecamatan badegan kabupaten ponorogo
2. Menjadi sumber inspirasi ,informasi dan pedoman bagi para pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat di bidang administrasi kependudukan.
3. Ikut serta membangun kualitas administrasi kependudukan di kecamatan badegan khususnya dan kabupaten ponorogo pada umumnya supaya menjadi lebih baik.



BAB II

PEMBAHASAN

A. DEFINISI KONSEP

Administrasi kependudukan merupakan pengakuan Negara bagi warga Negara Indonesia sebagai bukti identitas diri dan sebagai sarana pendukung akses pelayanan publik sehingga memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum serta perlindungan status hak sipil penduduk. Sehingga penduduk dapat mengakses program-program dari pemerintah seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, dan sebagai sarana pendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan kebijakan serta penataan anggaran untuk kesejahteraan rayat Indonesia.

B. LANDASAN TEORI

Administrasi Kependudukan pada hakikatnya memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Kementerian dalam negeri telah menerbitkan pemendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang diundangkan pada april 2022. Maksud dan tujuan di terbitkannya permendagri tersebut adalah sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kecamatan Badegan Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat sebuah identitas seseorang atau masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ponorogo merupakan cabang dari pusat atau bagian dari pemerintahan yang mana setiap kabupaten mempunyai instansi ini, tujuannya adalah agar mempermudah masyarakat dalam membuat identitas. Identitas itu bisa berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, dan akta kematian.

Identitas itu bertujuan agar pemerintah mengetahui data penduduk disuatu tempat tersebut. Kemudian identitas itu memudahkan masyarakat dalam berurusan di instansi – instansi lainnya karena dengan sebuah identitas atau jati diri, seseorang lebih mudah mengenal dan mengetahui data dari seseorang tersebut.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mamahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku,persepsi,motivasi,tindakan dan lasin lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

2. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian ini untuk menganalisis kurangnya kesadaran dari penduduk kecamatan badegan kabupaten ponorogo tentang pentingnya administrasi kependudukan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

BAB III

DESKRIPSI

A. DESKRIPSI POSTER LENGKAP

Pada era sekarang ini, administrasi kependudukan menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh setiap warga Negara Indonesia. Setiap penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan pengakuan negara bagi warga negara sebagai bukti identitas diri dan sebagai sarana pendukung akses pelayanan publik sehingga memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum serta perlindungan hak sipil penduduk. Sehingga penduduk dapat mengakses program-program dari pemerintah seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Output dari administrasi kependudukan pertama adalah berupa data kependudukan perseorangan maupun agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang digunakan dasar dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan nasional, regional, maupun local. Yang kedua output dari administrasi kependudukan berupa kartu, surat, dan akta. Contohnya adalah kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), surat pindah, akta kelahiran, akta kematian dan masih banyak lagi lainnya. Salah satu contoh ketika penduduk akan melakukan transaksi perbankan pertama kali atau waktu buka rekening, maka hal yang wajib dipenuhi oleh penduduk adalah dapat menunjukkan KTP-el. Jika penduduk sudah bisa menunjukkan KTP-el maka data penduduk tersebut berarti sudah masuk dalam database kependudukan yang bisa diakses oleh bank tempat melakukan transaksi tadi.

Di kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang wilayahnya di ujung barat dari Kabupaten Ponorogo yang berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah dengan jarak dari pusat kota Ponorogo sekitar 18 km yang mempunyai wilayah geografis yang beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Desa yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak adalah Desa Karangun kurang lebih berjumlah 5.500 jiwa, sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Bandaralim sekitar 1.850 jiwa. Luas wilayahnya sekitar 52,35 km² dengan jumlah penduduk sekitar 34.000 jiwa. Kecamatan Badegan wilayahnya terbagi menjadi 10 desa yaitu desa Badegan, desa Biting, desa Karangun, desa Watubonang, desa Dayakan, desa Tanjunggunung, desa Tanjungrejo, desa Karangjoho, desa Bandaralim, dan desa

kapuran. Dalam hal tertib administrasi kependudukan masih belum maksimal. Dengan adanya tingkat kesadaran penduduk yang masih rendah tersebut ada yang di manfaatkan oleh sebagian kecil orang yang mengambil keuntungan dengan menguruskan dokumen kependudukan ke pusat kota ponorogo maupun ke kecamatan dengan mematok

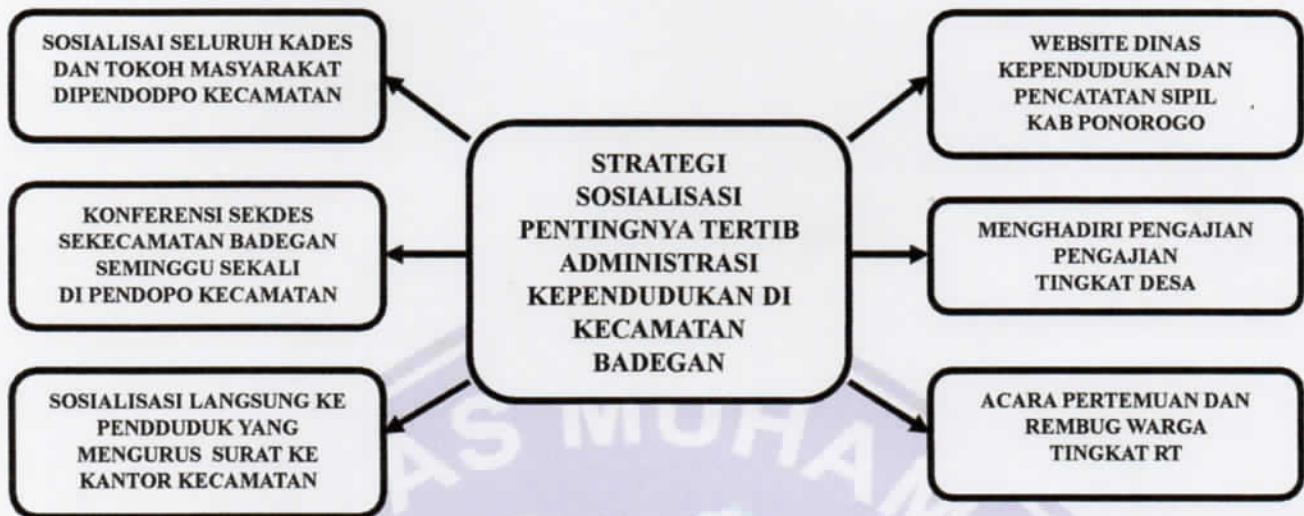
Berdasarkan permasalahan tersebut maka Kecamatan Badegan bekerja sama dengan Pemerintah Desa sekecamatan Badegan bersama-sama dan saling bahu-membahu melakukan sosialisasi yang dilaksanakan dari tingkat kecamatan sampai tingkat individu masyarakat atau penduduk. Di mulai pada awal tahun 2017 dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan pada kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama sekecamatan Badegan yang bertempat di pendopo kecamatan Badegan.

Di teruskan Setiap hari senin diadakan konferensi Sekretaris desa sekecamatan badegan dipendopo kecamatan. Dengan begitu jika ada informasi terkait administrasi kependudukan yang baru bisa langsung di sosialisasikan kepada sekretaris desa untuk di lanjutkan informasinya kepada penduduk desanya masing-masing. Juga dilaksanakan sosialisasi dengan menghadiri pengajian-pengajian yang di adakan di desa-desa wilayah kecamatan Badegan, menghadiri pertemuan-pertemuan dan rembung warga sampai tingkat RT yang kesemuanya pasti di selipkan informasi terkait pentingnya administrasi kependudukan. Selain dengan cara di atas, sosialisasi di berikan kepada tiap-tiap individu penduduk yang datang mengurus surat-menyurat ke kantor Kecamatan Badegan, dengan memberikan informasi-informasi terkait pentingnya administrasi kependudukan. Juga di berikan informasi terkait website dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ponorogo khususnya kepada generasi millenial supaya bisa lebih banyak mengakses informasi terkait dengan administrasi kependudukan, dengan tujuan bisa menjadi penyambung lidah pemerintah dalam hal pemberian informasi administrasi kependudukan kepada warga atau penduduk di lingkungannya masing-masing. Dengan berbagai strategi sosialisasi yang langsung menyasar kepada masyarakat atau penduduk maka hasilnya menjadi efektif, Terbukti dengan antusias penduduk dalam pengurusan administrasi kependudukan di kecamatan sangat tinggi. dari awal sosialisasi tahun 2017 kalau di prosentase kurang lebih masih 40% kesadaran tentang administrasi kependudukan, pada tahun 2022 sudah meningkat menjadi kurang lebih 95% penduduk sudah sadar akan pentingnya tertib administrasi

kependudukan. Jadi dengan semakin banyaknya pemberian sosialisasi dan informasi-informasi terkait dengan pentingnya administrasi kependudukan maka dengan sendirinya penduduk akan menyadari tentang pentingnya administrasi kependudukan dan dengan antusias mengurus sendiri data kependudukannya ke kecamatan , tidak lagi di titipkan kepada tetangga maupun orang lain. Dengan begitu penduduk sudah ikut serta untuk berperan aktif dalam pelaksanaan administrasi kependudukan supaya selaras dengan program-program pemerintah dalam pelayanan publik dan penataan anggaran dan perumusan kebijakan kebijakan secara Nasional,Regional maupun Lokal.



B. MODEL



STRATEGI SOSIALISASI PENTINGNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

SINOPSIS

Pada era sekarang ini, Administrasi kependudukan menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh setiap warga Negara Indonesia. Setiap penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan pelaksanaan Negara bagi warga Negara sebagai bukti identitas diri dan sebagai sarana pendukung akses pelayanan publik sehingga memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum serta perlindungan status hak sipil penduduk. Sehingga penduduk dapat mengakses program-program dari pemerintah seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Output dari administrasi kependudukan Pertama adalah berupa data kependudukan persorangan maupun agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendataan penduduk dan pencatatan sipil yang di gunakan dasar dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, penentuan kebijakan Nasional, Regional, maupun Lokal. Yang Kedua dari output administrasi kependudukan berupa Kartu, Surat, dan Akta. Contohnya adalah kartu keluarga (KK), Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Surat pindah, Akta kelahiran, Akta kematian dan masih banyak lagi lainnya. Salah satu contoh ketika penduduk akan melakukan transaksi perbankan pertama kali atau waktu buka rekening di bank, Maka hal pertama yang wajib di penuhi oleh penduduk adalah dapat menyajikan KTP-el. Jika penduduk sudah bisa menyajikan KTP-el maka data penduduk tersebut berarti sudah masuk dalam database kependudukan yang bisa di akses oleh bank tempat melakukan transaksi perbankan tadi.

PERMASALAHAN

Di kecamatan badegan kabupaten ponorogo yang wilayahnya di ujung barat dari kabupaten ponorogo yang berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah dengan jarak dari pusat kota ponorogo sekitar 18 km yang mempunyai wilayah geografis yang beragam dan dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Luas wilayahnya sekitar 52,35 km² dengan jumlah penduduk sekitar 34.000 jiwa. Kecamatan badegan wilayahnya terbagi menjadi 10 Desa yaitu Desa Badegan, Desa Liting, Desa Karang, Desa Watubonang, Desa Dayakan, Desa Tanjungagung, Desa Tanjungrejo, Desa Karangjoho, Desa Bendandim, dan Desa Kapuran. Desa yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak adalah Desa Karang kurang lebih berjumlah 5.500 jiwa, sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Bendandim sekitar 1.850 jiwa. Dalam hal tertib administrasi kependudukan masih belum maksimal. Dengan adanya tingkat kesadaran penduduk yang masih rendah tersebut ada yang di manfaatkan oleh sebagian kecil orang yang mengambil keuntungan dengan menggunakan dokumen kependudukan ke pusat kota ponorogo maupun ke kecamatan dengan memotong biaya yang memberatkan penduduk, padahal kalau diurus sendiri semua dokumen kependudukan tersebut adalah gratis.

ANALISA SITUASI

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Kecamatan Badegan bekerja sama dengan Pemerintah Desa sekecamatan Badegan bersama-sama dan saling bantu-membantu melakukan sosialisasi yang dilaksanakan dari tingkat kecamatan sampai tingkat individu masyarakat atau penduduk. Di mulai pada awal tahun 2017 dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan pada kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama sekecamatan Badegan yang bertempat di pendopo kecamatan Badegan. Di teruskan Setiap hari senin diadakan konferensi Sekretaris desa sekecamatan badegan di pendopo kecamatan. Dengan begitu jika ada informasi terkait administrasi kependudukan yang baru bisa langsung di sosialisasikan kepada sekretaris desa untuk di lanjutkan informasinya kepada penduduk desanya masing-masing. Juga dilaksanakan sosialisasi dengan mengadakan pengajian-pengajian yang di adakan di desa-desa wilayah kecamatan Badegan, menghadiri pertemuan-pertemuan dan rembug warga sampai tingkat RT yang kesemuanya pasti di siapkan informasi terkait pentingnya administrasi kependudukan. Selain dengan cara di atas, sosialisasi di berikan kepada tiap-tiap individu penduduk yang datang mengurus surat-menyurat ke kantor Kecamatan Badegan, dengan memberikan informasi-informasi terkait pentingnya administrasi kependudukan. Juga di berikan informasi terkait website dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ponorogo khususnya kepada generasi milenial supaya bisa lebih banyak mengakses informasi terkait dengan administrasi kependudukan, dengan tujuan bisa menjadi penyanggah lidah pemerintah dalam hal pemberian informasi administrasi kependudukan kepada warga atau penduduk di lingkungannya masing-masing. Dengan berbagai strategi sosialisasi yang langsung menyasar kepada masyarakat atau penduduk maka hasilnya menjadi efektif, Terbukti dengan antusias penduduk dalam pengurusan administrasi kependudukan di kecamatan sangat tinggi. dari awal sosialisasi tahun 2017 kalau di prosentase kurang lebih masih 40% kesadaran tentang administrasi kependudukan, pada tahun 2022 sudah meningkat menjadi kurang lebih 95 % penduduk sudah sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Jadi dengan semakin banyaknya pemberian sosialisasi dan informasi-informasi terkait dengan pentingnya administrasi kependudukan maka dengan sendirinya penduduk akan menyadari tentang pentingnya administrasi kependudukan dan dengan antusias mengurus sendiri data kependudukannya ke kecamatan, tidak lagi di titipkan kepada tetangga maupun orang lain. Dengan begitu penduduk sudah ikut serta untuk berperan aktif dalam pelaksanaan administrasi kependudukan supaya selaras dengan program-program pemerintah dalam pelayanan publik dan penataan anggaran dan penentuan kebijakan kebijakan secara Nasional, Regional maupun Lokal.



PEMBAUT : SUKAMTO
 Dr. JUSUF HARSONO, M.SI.
 Dra. EKAPTI WAHJUNI DJ, M.SI.
 ROBBY DARWIS NASUTION, S.IP.,M.A.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Administrasi kependudukan pada hakikatnya memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia. dan mempermudah masyarakat dalam membuat identitas. Identitas itu bisa berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, dan akta kematian. Identitas itu bertujuan agar pemerintah mengetahui data penduduk disuatu tempat tersebut. Kemudian identitas itu memudahkan masyarakat dalam berurusan di instansi – instansi lainnya dengan tertib administrasi kependudukan berarti ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan administrasi kependudukan supaya selaras dengan program –program pemerintah dalam penataan anggaran dan perumusan kebijakan kebijakan secara Nasional,Regional maupun Lokal.

B. KRITIK DAN SARAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Kecamatan Badegan dan pemerintah desa Sekecamatan Badegan harus selalu bersinergi , bahu membahu dan saling bergandengan tangan untuk menuntaskan semua permasalahan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan Badegan supaya seluruh penduduk ataupun masyarakat di wilayah kecamatan badegan bisa tercover dengan jelas segala permasalahannya dan tidak ada ketimpangan sosial dalam pemrograman yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk , Sehingga pelaksanaan penertiban administrasi kependudukan bisa selaras dan sejalan dengan program pemerintah dalam penataan anggaran dan perumusan kebijakan-kebijakannya.

DAFTAR GAMBAR

A. SOSIALISASI KE KEPALA DESA DAN TOKOH MASYARAKAT



B. KONFERENSI SEKDES SEKECAMATAN



C. SOSIALISASI KE PENDUDUK LANGSUNG



D. WEBSITE DAN MEDSOS DINAS DUKCAPIL



E. PENGAJIAN TINGKAT DESA



F. REMBUG WARGA TINGKAT RT



SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202325159, 31 Maret 2023

Pencipta

Nama : **Sukamto, Dr. Jusuf Harsono, M.Si. dkk**

Alamat : RT 05 RW 01 Dusun Nogo Desa Karangwaluh Kec. Sampung Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63454, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63454

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Alamat : Jalan Budi Utomo 10 Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471 Gedung D Rektorat Lantai 3, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63471

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Strategi Sosialisasi Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Januari 2023, di Ponorogo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000458082

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.